

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama yang mencerminkan perkembangan suatu wilayah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Tujuan pembangunan ekonomi tidak hanya meningkatkan volume produksi, tetapi juga diharapkan dapat mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara merata. Untuk mencapai pertumbuhan yang efektif, strategi pembangunan perlu diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) yang kuat terhadap perekonomian, sehingga mampu mendorong dinamika pertumbuhan lintas sektor (De Fretes, 2017). Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak cukup hanya difokuskan pada peningkatan angka pertumbuhan semata, tetapi juga harus memperhatikan kualitas transformasi sektoral yang terjadi.

Namun, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu atau dua sektor dominan. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor tertentu dapat menimbulkan ketidakseimbangan pembangunan, seperti meningkatnya kesenjangan pendapatan, terbatasnya penciptaan lapangan kerja, serta kerentanan terhadap guncangan eksternal. Oleh karena itu, selain mengembangkan sektor unggulan, pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan pembangunan antar sektor agar tidak menimbulkan disparitas ekonomi. Dalam konteks ini, sektor unggulan memang memiliki peranan penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi integrasi dengan sektor lain tetap harus diperhatikan agar pembangunan dapat berlangsung inklusif dan berkelanjutan (Rahardjanto, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, perubahan struktur ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam menilai kualitas pembangunan. Struktur ekonomi menggambarkan bagaimana perekonomian suatu daerah tersusun berdasarkan kontribusi masing-masing sektor terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dalam teori pembangunan, Todaro & Smith (2014) menekankan bahwa pembangunan jangka panjang umumnya disertai dengan pergeseran struktur

ekonomi, dari dominasi sektor primer (pertanian) ke arah sektor sekunder (industri pengolahan), hingga akhirnya sektor tersier (jasa) menjadi tulang punggung utama perekonomian. Pergeseran ini tidak hanya menandai pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga transformasi kualitatif dalam pola produksi, distribusi, dan konsumsi masyarakat.

Perubahan struktur ekonomi juga dapat digunakan sebagai ukuran untuk mengklasifikasikan wilayah sebagai daerah maju atau daerah yang masih tertinggal. Wilayah yang berhasil melakukan transformasi struktural biasanya menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat, tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi, serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan. Sebaliknya, daerah yang lamban dalam melakukan transformasi cenderung mengalami stagnasi, bahkan kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah lain. Dalam konteks pembangunan daerah, hal ini menjadi tantangan penting yang harus dijawab melalui kebijakan pembangunan berbasis potensi lokal.

Di Indonesia, arah pembangunan daerah semakin mendapat perhatian sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengelola potensi wilayahnya, menetapkan prioritas pembangunan, dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah mendorong pemerataan pembangunan antar daerah serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Kuncoro, 2014). Namun, kewenangan yang luas tersebut juga diiringi dengan tantangan, terutama terkait kemampuan daerah dalam mengidentifikasi sektor unggulan yang dimiliki dan mengelola sumber daya yang ada secara efektif (Wiguna & Budhi, 2019).

Dalam kerangka analisis pembangunan daerah, PDRB menjadi indikator utama untuk melihat kontribusi sektor-sektor ekonomi terhadap perekonomian suatu wilayah. Melalui analisis PDRB, dapat diketahui sektor mana yang menjadi basis pertumbuhan, sektor yang memiliki potensi berkembang, serta sektor yang relatif tertinggal. Oleh sebab itu, kajian terhadap struktur PDRB memiliki arti penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah (Siregar, 2015).

Identifikasi sektor unggulan berbasis analisis PDRB juga memungkinkan daerah menetapkan prioritas pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik wilayah (Sjafrizal, 2014).

Sektor unggulan berperan sebagai penggerak utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Menurut Arsyad (2010), keberadaan sektor unggulan juga menjadi basis bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sementara itu, Tarigan (2009) menekankan bahwa sektor unggulan dapat mendorong perkembangan sektor-sektor lain melalui keterkaitan ke depan (*forward linkage*) maupun keterkaitan ke belakang (*backward linkage*). Sejalan dengan itu, Soleh & Maryoni (2017) menambahkan bahwa sektor unggulan adalah sektor yang memiliki kemampuan melayani permintaan baik dari pasar domestik maupun luar daerah, sehingga menjadi motor penggerak utama pembangunan regional.

Dalam konteks Kabupaten Agam, penetapan sektor unggulan menjadi sangat relevan mengingat daerah ini memiliki keunggulan wilayah yang cukup beragam, baik dari segi sumber daya alam, potensi ekonomi, maupun kekayaan budaya lokal. Kabupaten Agam dikenal sebagai salah satu pusat produksi pangan, memiliki potensi industri kerajinan, serta kaya akan destinasi wisata unggulan seperti Danau Maninjau, Puncak Lawang, dan Ngarai Sianok. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat yang masih berakar pada adat Minangkabau dan nilai gotong royong menjadi modal sosial yang penting dalam mendukung pembangunan (Bappeda Agam, 2022). Namun, potensi besar tersebut belum sepenuhnya menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal. Sektor pariwisata misalnya, meskipun memiliki daya tarik yang tinggi, kontribusinya terhadap perekonomian daerah masih belum maksimal. Penelitian Sumarni, Yulhendri, dan Rizal (2023) menunjukkan bahwa jumlah objek wisata, wisatawan domestik, hotel, dan restoran berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sumatera Barat, tetapi kontribusinya belum sebanding dengan potensi besar yang dimiliki.

Jika dilihat dari dinamika struktural, data menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua dekade terakhir terjadi pergeseran komposisi sektor di Kabupaten Agam. Pada tahun 2010, sektor primer menyumbang 38,28% terhadap PDRB, namun turun

menjadi 31,83% pada tahun 2024. Sebaliknya, sektor tersier meningkat dari 41,66% pada 2010 menjadi 48,68% pada 2024, sementara sektor sekunder relatif stagnan di kisaran 19%. Perubahan ini mengindikasikan adanya pergeseran ke arah dominasi jasa, meskipun transformasi struktural tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh penguatan sektor industri (BPS Kabupaten Agam, 2010; 2024).

Sebagai pembandingan, wilayah lain di Sumatera Barat telah lebih cepat dalam melakukan transformasi struktural. Kota Bukittinggi, misalnya, menunjukkan dominasi sektor tersier yang sangat tinggi, yaitu mencapai 86,74%. Kabupaten Padang Pariaman juga mulai bergeser ke arah ekonomi jasa dengan kontribusi sektor tersier mencapai 58,34%, meskipun sektor primernya masih cukup dominan (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Agam relatif lebih lambat dalam melakukan transformasi, sehingga masih bergantung pada sektor-sektor tradisional.

Keterlambatan transformasi struktural ini bertentangan dengan konsep pembangunan yang dikemukakan Todaro & Smith (2014), yang menekankan bahwa pertumbuhan jangka panjang idealnya diikuti dengan pergeseran dari sektor primer ke sektor industri dan jasa. Dengan kata lain, Kabupaten Agam masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan transformasi struktural yang optimal.

Meski demikian, secara kontribusi terhadap perekonomian provinsi, posisi Kabupaten Agam cukup strategis. Berdasarkan data tahun 2023, Kabupaten Agam menempati posisi kedua terbesar di Sumatera Barat dengan kontribusi PDRB sebesar 8,38%, tepat di bawah Kota Padang yang mencapai 25,52% (BPS Provinsi Sumatera Barat, 2024). Besarnya kontribusi ini menunjukkan peranan penting Kabupaten Agam dalam menopang perekonomian provinsi. Akan tetapi, tingginya kontribusi tersebut juga menandakan bahwa perekonomian Agam masih bertumpu pada sektor basis, khususnya pertanian, yang peningkatan produktivitasnya belum sejalan dengan serapan tenaga kerja (Devi, Syahrial, & Fauzi, 2022).

Perbedaan arah pembangunan dengan daerah lain juga semakin menegaskan tantangan yang dihadapi Kabupaten Agam. Sebagai contoh, Kabupaten Padang

Pariaman telah menunjukkan kinerja lebih progresif melalui sektor industri pengolahan yang tidak hanya memberi kontribusi besar terhadap PDRB, tetapi juga mampu menyerap lebih dari 64 ribu tenaga kerja pada tahun 2022 (BPS Kabupaten Padang Pariaman, 2023). Kondisi ini memperlihatkan bahwa meskipun Kabupaten Agam memiliki kontribusi PDRB yang besar, arah transformasi sektoralnya belum cukup kuat untuk meningkatkan kualitas pembangunan daerah.

Berbagai penelitian sebelumnya juga menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai sektor unggulan di Kabupaten Agam. Febriyani & Iryani (2024) menemukan bahwa sub sektor pertanian masih memiliki keunggulan kompetitif berdasarkan analisis *Location Quotient (LQ)*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Namun, berbeda dengan itu, Jannah, Kurniawati & Adry (2018) menegaskan bahwa sektor perdagangan serta industri pengolahan justru memiliki prospek yang lebih menjanjikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dibandingkan sektor pertanian. Perbedaan hasil kajian tersebut memperlihatkan adanya *research gap*, sehingga dibutuhkan penelitian terbaru dengan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai sektor unggulan di Kabupaten Agam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi, mengidentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam secara berkelanjutan. Dengan demikian, temuan penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan. Atas dasar itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perubahan Struktur Ekonomi dan Identifikasi Sektor Unggulan di Kabupaten Agam.”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah disampaikan, permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sektor-sektor apa saja yang termasuk sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Agam pada periode 2010-2024.

2. Bagaimana perubahan struktur perekonomian daerah Kabupaten Agam selama periode 2010-2024.
3. Apa saja kebijakan yang perlu diterapkan oleh pemerintah dalam sektor-sektor unggulannya?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis sektor-sektor yang berperan sebagai sektor unggulan dalam perekonomian Kabupaten Agam periode 2010-2024.
2. Menganalisis perubahan struktur perekonomian Kabupaten Agam periode 2010-2024.
3. Memberikan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam pengembangan sektor unggulan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten Agam.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memperluas pengetahuan dan memperkaya referensi dalam kajian mengenai sektor-sektor ekonomi unggulan yang berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun kebijakan strategis yang berkaitan dengan penetapan sektor unggulan dan potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan.
3. Menjadi sumber acuan yang bermanfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya yang membahas analisis sektor unggulan dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah atau wilayah.